

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANG PASIR TANPA IZIN
DI DESA BULONTALA TIMUR (DITINJAU DARI PASAL 27 PERDA BONE
BOLANGO NO. 8 TAHUN 2012)”**

OLEH

MUHAMMAD RIZKY BAU

271413140

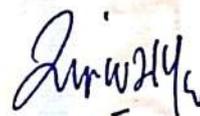
Telah Diperiksa dan Disetujui

PEMBIMBING 1



PROF. DR. FENTY U. PULUHULAWA, S.H, M.HUM
NIP. 19680409 199303 2 001

PEMBIMBING 2



Hj. NIRWAN JUNUS S.H M.H
NIP. 19690602 200003 2 001

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN ILMU HUKUM



SUWITNO Y IMRAN S.H M.H
NIP. 19830622 200912 1 004

**LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANG PASIR TANPA IZIN
DI DESA BULONTALA TIMUR (DITINJAU DARI PASAL 27 PERDA BONE
BOLANGO NO. 8 TAHUN 2012)”**

Oleh :

MUH. RIZKY BAU
NIM : 271413140

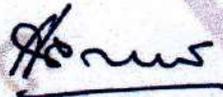
Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Penguji

Hari/Tanggal : 26 Maret 2019

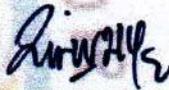
Waktu : 11:00 Wita s/d Selesai

Komisi Penguji

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001


(.....)

Hj. Nirwan Junus, SH, MH
NIP. 19690602 200003 2 001


(.....)

Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum
NIP. 19690704 199802 2 001


(.....)

Abdul Hamid Tome, SH, MH
NIP. 19840501 201504 1 002


(.....)

Mengetahui

Plt. Dekan Fakultas Hukum


Dr. Dian Ekawaty Jamall, SH, MH
NIP. 19741223 200312 2 001

ABSRTRAK

MUH. RIZKY BAU (NIM : (271413140) 2018. “PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI DESA BULONTALA TIMUR (DITINJAU DARI PASAL 27 PERDA BONE BOLANGO NO. 8 TAHUN 2012)”. Dibimbing oleh masing – masing Pembimbing I : PROF, DR, FENTY U. PULUHULAWA, SH, M.HUM dan Pembimbing II : HJ. NIRWAN JUNUS, SH, MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin ditinjau dari Pasal 27 Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meminimalisir pertambangan pasir tanpa izin di desa Bulontala Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan “Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 27 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang di maksud Huruf (b) kawasan sempadan sungai, termasuk sungai Bone”, selain itu pada Pasal 24 Huruf (c) Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012 Kawasan sepadan sungai termasuk dalam Kawasan lindung. Ini menjelaskan semua aktifitas Pertambangan dalam konteks apapun di larang pemerintah apalagi Sungai Bone Sebagai Icon Bone Bolango. Hingga saat ini masyarakat tidak membuat surat izin dari pertambangan karena 2 alasan : 1) Banyaknya persyaratan; 2) Financial;. Karena pertambangan ini dilakukan tanpa izin maka mereka dapat dikenakan Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Adapun peran dari pemerintah daerah dalam meminimalisir pertambangan pasir di Desa Bulontala Timur masih memiliki kendala yaitu masih adanya rasa dilema dari pemerintah dalam mengeksekusi pertambangan ini, karena apabila dihentikan dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah dan apabila di biarkan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan.

KATA KUNCI: Peran, Daerah, Penambang Pasir, Tanpa Izin

ABSTRACT

MUHL. RIZKY BAU (NIM : (271413140) 2018. "REGIONAL GOVERNMENT'S ROLE TOWARDS UNSANCTIONED SAND MINERS IN EAST BULONTALA VILLAGE (BASED ON ARTICLE 27 OF BONE BOLANGO LOCAL REGULATION #8 2012)". Supervised by principal supervisor : PROF, DR, FENTY U. PULUHULAWA, SH, M.HUM and co-supervisor : H.J. NIRWAN JUNUS, SH, MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This research aims to analyze the legal status of unsanctioned sand miners based on article 27 of Bone Bolango local regulation #8 2012 regarding spatial plans and government's role in minimalizing unsanctioned sand minings in east Bulontala Village, with the type of this research being juridical and empirical research.

The research results reveals that based on "Bone Bolango local regulation #8 2012 regarding spatial plans article 27 local protected area as intended (B) river-equivalent area, including Bone river." Meanwhile, in article 24 (C) Bone Bolango local regulation #8 2012 river-equivalent area is included as protected area. This would mean that allmining activity in any context is forbidden by the government, especially around Bone river as the icon of Bone Bolango. There were several people to date who have not yet administered mining license due to : 1) a lot of requirements, and; 2) financial matters. These people are subjected to article 158 of constitution #4 2009 regarding Mineral and coal minings due to the conducting of unsanctioned minings.

Local Government's role in minimizing the sand minings at east Bulontala Village is still hindered by the government's dilemma to execute the mining, because the termination of the mining will elevate the poverty rate in the local area, while environment system is at cost if no actions are taken.

KEYWORD: Role, Area, Sand Miners, Unsanctioned

